

## KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia

Tanggal : 11 Januari 2011

Subyek : Konversi Hutan

Hal : 9

### Konservasi Hutan Tergerus Fulus Industri Sawit

Operasi penertiban lahan sawit yang dilakukan sejumlah instansi dan Kementerian Kehutanan dinilai sebagai pencitraan semata.

Sedikitnya 2.500 hektare lahan sawit Desa Bagan Limau, Kecamatan Okui, Kabupaten Pelalawan, Riau, akhir tahun lalu dibersihkan paksa dengan menggunakan alat berat. Pasalnya perkebunan sawit tersebut termasuk dari 28 ribu hektare areal konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang berubah jadi lahan sawit.

Kepala Balai TNTN Hayani Suprachman yang memimpin langsung operasi penertiban dan pembersihan menyebutkan penindakan kebun sawit di areal konservasi gajah terbesar di Indonesia itu didasarkan atas UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. "Kami juga berpegang pada-dasar hukum Kemenhut 255/2004 tentang Perlindungan Taman Nasional," tegas Hayani kepada Media Indofiesin, akhir pekan lalu. Target Balni TNTN, ucapnya, seluruh kawasan taman nasional yang telanjur menjadi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi hutan.

Operasi penertiban TNTN 2010 itu sedikitnya melibatkan 250 personel gabungan dari unsur Polisi Militer, Brimob, polres dan polsek, serta Satuan Reaksi Cepat Polisi Hutan (Pol-hut). Selain itu, sebanyak dua ekskavator digunakan dalam aksi tersebut.

Hayani mengungkapkan dari 22 desa yang bersinggungan langsung dengan TNTN, sebanyak tiga desa, yaitu Bagan Limau, Air Hitam, dan Lubuk Kembang Bunga, telah menyalahi aturan karena termasuk areal inti TNTN yang ditanami sawit.

"Operasi yang kami lakukan ini untuk menertibkan perambahan di TNTN yang telanjur marak sejak 1998. Dari 83.064 hektare luas TNTN, diperkirakan, 28 ribu hektare telah dirambah dan berubah menjadi perkebunan sawit serta permukiman warga," jelas Hayani.

Membantah

Kapolres Pelalawan AKB Ari Rahman Nafarin mengatakan penertiban kawasan konservasi gajah nasional di TNTN dilakukan berdasarkan permintaan Menteri Kehutanan. Pihak kepolisian hanya melakukan pengawalan untuk mencegah terjadi bentrokan atau hal yang tak diinginkan. "Hanya beberapa gangguan dan protes dari kepala desa serta warga."

Ia menambahkan, dari hasil tinjauan intelijen diketahui kepemilikan lahan TNTN telah sengaja

disalahgunakan menjadi kebun sawit milik perorangan.

"Itulah sebab penertiban harus dilakukan. Seperti yang dilihat, semua pasukan pengawalan disertakan dengan senjata lengkap," tegasnya.

Kepala Desa Bagan Limau Muhammad Noor membantah jika dikatakan kawasan sawit di desanya ilegal. Pasalnya, Desa Bagan Limau telah memiliki izin pemekaran pada 2007. "Luas desa 12.450 hektare telah mengantongi izin pemekaran administrasi. Kami nilai pemerintah pusat sudah semena-mena menganiaya kami rakyat kecil di sini," jelasnya.

Ia menyebutkan, nasib 418 keluarga semakin terkatung-katung manakala pada 1 Oktober 2010 lalu Kementerian Kehutanan menetapkan 95% kawasan administrasi desa masuk TNTN. "Kami menginginkan inklav. Keluarkan desa kami dari TNTN dan jangan semena-mena menghancurkan kebun sawit warga," pintanya.

Terus berlanjut

Operasi penertiban terhadap kepungan bisnis industri kelapa sawit ilegal di Riau terus berlanjut. Hal itu dilakukan pada lebih dari 1.000 hektare hutan di cagar biosfer internasional Giam Siak Kecil (GSK), Kabupaten Bengkalis, Riau, yang habis dibabat perambah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Ribuan tual kayu bekas tebangan ditemukan ditumpuk sejauh mata memandang bersama empat alat berat yang digunakan para perambah.

"Di sana kami juga menemukan ribuan tual kayu yang ditumpuk, ribuan bibit sawit, dan empat alat berat," kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Kurnia Rauf.

Operasi penertiban yang dilakukan bersama Bareskrim Mabes Polri terkait penguasaan kawasan huta/i atau fungsi hutan tanpa izin itu sampai kinimasih dalam proses.

"Sejauh ini barang bukti kami sita dan masih ditumpuk di sekitar lokasi temuan. Sedangkan empat operator alat berat dibawa ke Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut," jelas Kurnia.

Dugaan sementara aktivitas perambahan dan illegal logging di zona inti cagar biosfer Giam Siak Kecil seluas 178 ribu hektare itu diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit. Hal itu dibuktikan dari ditemukannya ribuan bibit sawit siap tanam di sekitar lokasi.

"Kualitas kayu dari tanah gambut kurang baik walau indikasi illegal logging tetap dapat dikaitkan. Namun dugaan kami lahan yang dirambah untuk kebun kepala sawit."

Ia menambahkan, sampai kini tim masih melakukan proses penyidikan.

## Primadona

Fenomena alih fungsi hutan konservasi menjadi perkebunan sawit ilegal di Riau seiring dengan menggiurkannya harga sawit sebagai urat nadi perekonomian baru masyarakat. Bahkan, sejumlah kawasan suaka margasatwa atau 99% kini berubah menjadi kebun sawit milik perseorangan. Berdasarkan data BBKSDA Riau, Suaka Margasatwa Balai Raja seluas 18 ribu hektare kini telah berganti menjadi kebun sawit masyarakat. Begitu juga di Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Bukit Suligi, Mahato, Tahura Sultan Syarif Kasim, dan hutan lindung Bukit Betabuh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menyebutkan luas kebun sawit di Riau saat ini membengkak menjadi yang terbesar. Total lahan sawit pada 2010 diperkirakan mencapai 2,06 juta hektare dari 1,7 juta hektare pada 2008. Produksi minyak sawit mentah (CPO) dari Riau mencapai 6 ton per tahun, atau setara dengan 26%, produksi nasional. Bahkan, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Riau tercatat Rp5,62 triliun berasal dari sumbangan kelapa sawit. Kelapa sawit telah menjadi urat nadi perekonomian di Riau dengan memberikan kontribusi 14% terhadap sumbangan nonmigas.

Distribusi kepemilikan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau sebesar 50,51%, yang dimiliki oleh 356 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah itu jauh lebih luas daripada kepemilikan kebun kelapa sawit swasta dan BUMN. Dalam mencermati kondisi itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Hariansyah Usman meminta pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi kawasan konservasi di Riau. Bahkan Walhi menuding adanya pembiaran dari pemerintah terkait dengan perambahan daerah konservasi di Riau.

"Kami menduga adanya pembiaran dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah tahu ada perambahan kelapa sawit oleh para tauke besar atau oknum pejabat di daerah konservasi. Namun dibiarkan dan nantinya yang dituduh masyarakat yang sebenarnya hanya tenaga upah harian di kebun sawit itu," ungkap Hariansyah.

Hariansyah juga menyayangkan operasi penertiban yang dilakukan Balai TNTN, BBKSDA Riau, dan Kementerian Kehutanan yang hanya bersifat klise dan pencitraan. "Coba perhatikan tindak lanjut dari operasi itu. Nihil kan. Masak mereka tidak tahu ada kebun sawit, sawmill, dan pekerja di daerah konservasi," ujar Hariansyah.

Ia menyarankan jika pemerintah tidak sanggup dalam menjaga daerah konservasi, sebaiknya pengelolaan daerah itu diserahkan sepenuhnya ke masyarakat. "Akibat dari rusaknya daerah konservasi oleh sawit yakni bencana ekologis banjir, kabut asap yang rutin di Riau. Karena yang rugi adalah masyarakat, sebaiknya kalau tidak mampu menjaga, lebih baik serahkan kepada masyarakat Riau," ungkap aktivis yang disapa Kaka itu.